



**PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor)**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Indrie Avisha
0221 18 082

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2023



**PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)

**PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor)**

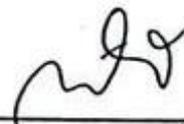
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023

Indrie Avisha
0221 18 082

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang
(Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si.,
CMA., CAPM., CAP.)



Ketua Komisi Pembimbing
(Budiman Slamet, Drs, Ak., M.Si., CA., CFrA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Sujatmiko Wibowo, ST., M.Ak.)



Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indrie Avisha
Nomor Pokok Mahasiswa : 022118082
Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Kabupaten Bogor)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2023



Indrie Avisha

0221 18 082

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan,
tahun 2023 Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah,, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

INDRIE AVISHA. 022118082. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Kabupaten Bogor). Dibawah bimbingan: BUDIMAN SLAMET dan SUJATMIKO WIBOWO. 2023.

Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam penyajian laporan keuangan, pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan secara relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan ungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan sumber data primer. Populasi dalam penelitian ini pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor. Teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu *non probability sampling*. Sampel penelitian ini sejumlah 70 pegawai pada bagian bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang aset, bidang akuntansi dan yang berkaitan dengan masalah keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan survei yang diperoleh dengan cara pembagian kuesioner kepada para responden. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data dengan Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik dengan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas, Analisis Regresi Linear Berganda, Pengujian Hipotesis dengan Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Parsial (Uji t), dan Signifikan Simultan (Uji F) menggunakan program IBM SPSS *Statistics 25*.

Hasil uji hipotesa secara parsial menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan daerah Kabupaten Bogor dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor. Hasil uji hipotesa secara simultan yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor. Nilai koefisien determinasi sebesar 69,1% akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan, sedangkan sisanya 30,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur seraya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor)”**. Dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Penulis menyadari, segala upaya yang telah dilakukan tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu hingga terselesaikannya proposal penelitian ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Orang tuaku tercinta Suminah dan Hendry Fuad yang selalu dengan ikhlas memberikan dukungan dan perhatian, kasih sayang, semangat dan doa yang tiada henti kepada penulis.
3. Kedua adikku Virda Agesti dan Hafiz Zahran Kianu yang telah menyemangati dan mengingatkan agar skripsinya cepat selesai.
4. Kedua Uwak ku yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. selaku Rektor Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CAP. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keamasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
9. Bapak Budiman Slamet, Drs., M.Si., Ak., CA., CFrA. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
10. Bapak Sujatmiko Wibowo, ST., M.Ak. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan

skripsi.

11. Dosen-dosen Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat bagi saya.
12. Seluruh staf Tata Usaha dan pelaksana Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
13. Teman-teman masa SMP Pipit, Devina, Rima, Okta dan juga teman-teman masa SMK Dinda, Fanny, Aulia, Rahayu yang selalu berbagi suka duka, yang selalu memberikan ilmu yang mereka punya dan menjadi tempat bagi penulis untuk belajar dan berproses.
14. Teman-teman Pengurus Himpunan Mahasiswa Akuntansi FEB Universitas Pakuan Periode 2018/2019 dan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa FEB Universitas Pakuan Periode 2021/2022 yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
15. Teman-teman Akuntansi kelas D, teman-teman satu bimbingan, teman-teman satu angkatan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan angkatan 2018 serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi.
16. Teruntuk Heri Simanjuntak yang selalu memberikan *support* dan waktu nya disaat sulit dan selalu memberikan keceriaan juga semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Bogor, Juli 2023

Indrie Avisha

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI	vii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	v
LEMBAR HAK CIPTA	vi
ABSTRAK	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Maksud Penelitian	8
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Praktis.....	8
1.4.2 Kegunaan Akademis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah.....	9
2.1.1 Definisi Penyajian Laporan Keuangan Daerah.....	9
2.1.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Daerah.....	10
2.1.3 Manfaat Penyajian Laporan Keuangan Daerah	11
2.1.4 Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Keuangan Daerah.....	11
2.1.5 Komponen-Komponen Laporan Keuangan Daerah	13
2.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	14
2.2.1 Definisi Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah.....	14
2.2.2 Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah.....	15
2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	15
2.3.1 Definisi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	15
2.3.2 Konsep Akuntabilitas	16
2.3.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas	17
2.3.4 Aspek-Aspek Akuntabilitas.....	17
2.3.5 Indikator Akuntabilitas	18

2.4 Opini Badan Pemeriksa Keuangan	19
2.5 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	21
2.5.1 Penelitian Terdahulu	21
2.5.2 Kerangka Pemikiran	26
2.6 Hipotesis Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	30
3.4 Operasionalisasi Variabel	31
3.5 Metode Penarikan Sampel	33
3.6 Metode Pengumpulan Data	33
3.7 Metode Analisis Data	34
3.7.1 Analisis Deskriptif dan Variabel Penelitian	34
3.7.2 Uji Kualitas Data	34
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	35
3.8 Analisis Regresi Linear Berganda	36
3.9 Uji Hipotesis	37
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Sejarah Pemerintah Kabupaten Bogor	38
4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Bogor	38
4.1.3 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bogor	39
4.1.4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor ..	39
4.1.5 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Bogor	41
4.1.6 Hasil Pengumpulan Data	41
4.1.7 Deskripsi Karakteristik Responden	42
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data	45
4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data	48
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	50
4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda	53
4.2.5 Pengujian Hipotesis	54
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data	57
4.3.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	58
4.3.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	59
4.3.3 Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	62

5.1 Simpulan.....	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
DAFTAR LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat Tahun 2010-2020.....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2.2	Matriks Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	31
Tabel 4.1	Rincian Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	42
Tabel 4.2	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 4.3	Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 4.4	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir	43
Tabel 4.5	Identitas Responden Berdasarkan Jabatan	44
Tabel 4.6	Identitas Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	44
Tabel 4.7	Hasil Kuesioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah.....	45
Tabel 4.8	Hasil Kuesioner Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah.....	46
Tabel 4.9	Hasil Kuesioner Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	47
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah.....	48
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah.....	48
Tabel 4.12	Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	49
Tabel 4.13	Hasil Uji Reliabilitas	49
Tabel 4.14	Hasil Uji Normalitas	50
Tabel 4.15	Hasil Uji Multikolinearitas.....	52
Tabel 4.16	Hasil Uji Heteroskedastisitas	53
Tabel 4.17	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	54
Tabel 4.18	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	55
Tabel 4.19	Hasil Uji Parsial (Uji t)	56
Tabel 4.20	Hasil Uji Signifikan Simultan (F).....	57
Tabel 4.21	Hasil Hipotesis Penelitian	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Opini Pemeriksaan LKPD di Jawa Barat	5
Gambar 2.1 Konstelasi Penelitian	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Bogor.....	41
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	51
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	68
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	73
Lampiran 3 Surat Permohonan Riset ke Kesbangpol Kabupaten Bogor	79
Lampiran 4 Surat Permohonan Riset ke BPKAD Kabupaten Bogor.....	80
Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol ke BPKAD Kabupaten Bogor.....	81
Lampiran 6 Uji Kualitas Data dengan Uji Validitas, Uji Realibilitas.....	82
Lampiran 7 Uji Asumsi Klasik dengan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas	85
Lampiran 8 Analisis Regresi Linier Berganda	87
Lampiran 9 Pengujian Hipotesis dengan Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Signifikan Simultan (Uji F) dan Uji Parsial (Uji t)	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era reformasi yang terjadi di Indonesia saat ini, masyarakat menuntut agar pemerintahan mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. Hal ini disebabkan oleh asas otonomi daerah membuat masyarakat meningkatkan tuntutan terhadap pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, sehingga tuntutan ini mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang baik di pusat maupun daerah.

Pada saat dimulainya otonomi daerah harapan yang muncul adalah pemerintah daerah semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun melakukan pembangunan di daerah masing-masing. Oleh karena itu daerah juga diberi kebebasan dalam hal penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya. Dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah diperlukan pendanaan yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sehingga perlu untuk dipahami bahwa LKPD merupakan output dari suatu sistem akuntansi yang tidak terlepas dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Sehingga untuk menguraikan secara komprehensif penyebab dari dihasilkannya suatu opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD.

Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalin dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit unit kerja didalamnya satuan kerja perangkat daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah juga merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal yaitu tanggungjawab kepala daerah kepada masyarakat, investor, lembaga, pers serta pihak pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan ekonomi sosial dan politik. Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan ungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut

adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan secara relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan serta mempublikasikannya kepada publik. Selanjutnya, aksesibilitas laporan keuangan juga memiliki keterkaitan di dalamnya, akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. (Miftahul Reza Fauziyah dan Nur Handayani, 2017)

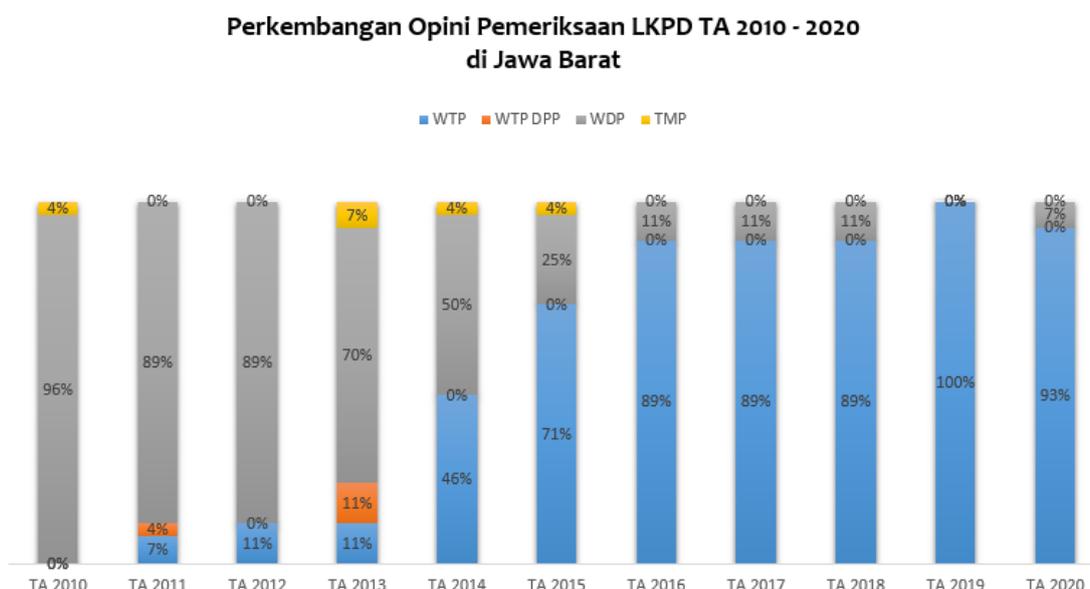
Namun, permasalahan yang dihadapi sekarang adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah nampaknya belum menjadi hal yang umum. Peran laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan mudah dijangkau oleh para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan sulit dijangkau dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan. (Nurul, 2018).

Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari *single entry* menuju *double entry* merupakan perubahan yang cukup revolusioner. Di sisi lain, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporannya, dengan menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara luas agar laporan keuangan dapat diperoleh dengan mudah. Penggunaan informasi keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi masyarakat tahun berikutnya.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Dalam organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat melalui laporan keuangannya. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik, pemerintah perlu mengakses laporan keuangan

13	Kab. Majalengka	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP						
14	Kab. Pangandaran	-	-	-	-	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP						
18	Kab. Sumedang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP						
19	Kab. Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
21	Kota Banjar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP						
25	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WDP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP						
28	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

(Sumber : Data diolah oleh jabar.bpk.go.id)



Gambar 1.1 Perkembangan Opini Pemeriksaan LKPD di Jawa Barat

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor selama tahun 2010-2020 mendapatkan opini yang berbeda dari BPK. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mendapatkan predikat WDP sebanyak lima kali dan mendapatkan predikat WTP sebanyak enam kali. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penilaian tertinggi atas laporan keuangan daerah dengan menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Wajar yang dimaksud adalah bahwa laporan keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Adapun opini WTP yang dikeluarkan BPK ternyata tidak menjamin suatu daerah bebas dari korupsi. Jika melihat realitas yang terjadi, penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Bogor dikatakan belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Masih banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti pada tahun 2017 adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) Rp14,3 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2017 yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor (<https://bogor.pojoksatu.id> diakses 10 Juni 2022). Kemudian pada tahun 2017-2018 adanya dugaan korupsi dana bantuan bencana yang dilakukan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD, berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan dan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Bogor sebesar Rp1,7 miliar. (<https://metro.tempo.co/> diakses pada 3 Januari 2023). Dan juga pada 2019 Mantan Kepala Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor itu menilap uang dari enam kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana desa dan

bantuan keuangan (bankeu) provinsi. Dana yang dikorupsi tersebut seharusnya dibayarkan untuk betonisasi jalan desa, bantuan rumah tidak layak huni, hingga bantuan untuk badan usaha milik desa, “Total anggarannya ini Rp3,4 miliar, kemudian setelah diaudit oleh inspektorat, ada kerugian Rp900 juta,” kata Kepala Kejari Kabupaten Bogor. (<https://megapolitan.antaranews.com> diakses 3 Januari 2023). Adapun pada tahun 2020 terjadi dugaan korupsi suap pengurusan izin rumah sakit senilai 120 juta disita di Kecamatan Cibungbulang, dan vila di Kawasan Puncak Kecamatan Cisarua yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor (<https://www.jurnaljabar.id> diakses 10 Juni 2022).

Kasus korupsi tersebut, berdasarkan sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan terkait penyalahgunaan jabatan masih terdapat kelemahan. Penyajian laporan keuangan yang kurang baik akan mendorong penurunan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan semakin tingginya tingkat aksesibilitas laporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian terkait masalah temuan kasus pada SKPD perlu dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terutama pada BPKAD Kabupaten Bogor. Peneliti ingin mengetahui seberapa baik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang ada di Kabupaten Bogor dalam menyajikan laporan keuangan, peneliti juga ingin mengetahui seberapa mudahnya akses laporan keuangan daerah bagi masyarakat umum dan juga untuk mengetahui se-akuntabel apa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bogor sehingga mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) selama 6 tahun berturut-turut sejak 2015.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Setiap daerah yang menjalankan otonomi harus menyajikan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang diperolehnya dari dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah kabupaten Bogor diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor selama tahun 2010-2020 mendapatkan opini yang berbeda dari BPK. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mendapatkan predikat WDP sebanyak lima kali dan

mendapatkan predikat WTP sebanyak enam kali. Namun, opini WTP yang dikeluarkan BPK ternyata tidak menjamin suatu daerah bebas dari korupsi. Jika melihat realitas yang terjadi, penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan di khususnya Kabupaten Bogor dikatakan belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Masih banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti pada tahun 2017 adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) Rp14,3 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2017 yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor (<https://bogor.pojoksatu.id> diakses 10 Juni 2022). Kemudian pada tahun 2017-2018 adanya dugaan korupsi dana bantuan bencana yang dilakukan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD, berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan dan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Bogor sebesar Rp1,7 miliar. (<https://metro.tempo.co/> diakses pada 3 Januari 2023). Dan juga pada 2019 Mantan Kepala Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor itu menilap uang dari enam kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana desa dan bantuan keuangan (bankeu) provinsi. Dana yang dikorupsi tersebut seharusnya dibayarkan untuk betonisasi jalan desa, bantuan rumah tidak layak huni, hingga bantuan untuk badan usaha milik desa, "Total anggarannya ini Rp3,4 miliar, kemudian setelah diaudit oleh inspektorat, ada kerugian Rp900 juta," kata Kepala Kejari Kabupaten Bogor. (<https://megapolitan.antaranews.com> diakses 3 Januari 2023). Adapun pada tahun 2020 terjadi dugaan korupsi suap pengurusan izin rumah sakit senilai 120 juta disita di Kecamatan Cibungbulang, dan vila di Kawasan Puncak Kecamatan Cisarua yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor (<https://www.jurnaljabar.id> diakses 10 Juni 2022).

Kasus korupsi tersebut, berdasarkan sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan terkait penyalahgunaan jabatan masih terdapat kelemahan. Dilihat dari sisi penyajian laporan keuangan yang seharusnya digunakan untuk menjamin para pengguna dan pihak otoritas penguasa atas pengelolaan sumber daya sesuai denganketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini berarti masih terkendala dalam menyajikan laporan keuangan dan aksesibilitasnya.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor?

2. Bagaimana Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Pemerintahan Kabupaten Bogor.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui pengaruh Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam penyajian dan aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, karena dengan mengetahui Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitasnya, pemerintah dapat menyajikan Laporan Keuangan dan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan agar akuntabel, dan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu akuntansi serta untuk menambah pengetahuan mengenai akuntansi pemerintahan daerah dan sebagai bahan masukan untuk melakukan selanjutnya lebih baik lagi terutama yang berkaitan dengan penerapan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada instansi pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah

2.1.1 Definisi Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Sebagai media akuntabilitas publik, laporan keuangan pemerintah daerah berguna untuk mempertanggungjawabkan penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan publik kepada pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu dengan didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang dicapai. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 56 ayat (1) tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian dijelaskan pada ayat (3), LKPD tersebut diserahkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah selesai diaudit oleh BPK maka Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang merupakan unit pemerintahan pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. BPKAD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap BPKAD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan BPKAD yang ada dalam pemerintahan

daerah. Sesuai dengan Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 24 laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Terdapat beberapa kriteria kualitas informasi spesifik keputusan, diantaranya adalah (Suwardjono 2014, 164–177) :

1. Relevan

Kemampuan informasi dalam membentuk pemakai untuk mencapai tujuannya, untuk dipahami maknanya, dan tepat waktu dalam ketersediaannya untuk fasilitas proses pengambilan keputusan atau kebijakan.

2. Andal

Kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan dan keterujian bahwa informasi tersebut benar atau valid, termasuk ketetapan penyimbolan (kecocokan pengukur dan fenomena yang di ukur)

3. Dapat dibandingkan

Kemampuan informasi untuk membantu para pemakai dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara perangkat fenomena ekonomi.

4. Dapat dipahami

Ketidakihasan dan tidak bertindak sesuai keinginan pihak tertentu atau menguntungkan/merugikan pihak tertentu atau menghindari akibat konsekuensi.

2.1.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan suatu entitas dibuat bukan tanpa satu tujuan tertentu. Sesuai dengan PSAP 01 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Tujuan umum laporan keuangan bagi organisasi pemerintah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban akuntabilitas.
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi pemerintah.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.3 Manfaat Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Manfaat laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah kebutuhan atas laporan keuangan, laporan keuangan untuk transparansi, laporan keuangan untuk akuntabilitas memberikan informasi dan mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Menurut Mahmudi (2016:6) Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuidasi dan solvabilitas.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kontak yang telah disepakati dalam ketentuan lain yang diisyaratkan.
4. Memberikan informasi keuangan untuk perencanaan dan penganggaran.
5. Memberikan informasi keuangan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dikemukakan bahwa ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yakni:

1. Basis Akuntansi

Pada prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis

laporan operasional, akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan agar basis akuntansi disajikan bersama laporan keuangan dengan basis kas.

Basis akrual untuk laporan operasional sebagai petunjuk bagi pendapatan yang diakui ketika hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas belum diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi dengan mudah.

3. Realisasi (*Realization*)

Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang wajib disusun, maka pendapatan basis kas harus diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah maupun mengurangi kas.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Prinsip ini sebagai Informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka dari itu, segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Jika substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (*Periodicity*)

Agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, meskipun dikehendaki pula periode bulanan, triwulan, dan semester.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Keadaan tersebut bukan berarti tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, namun metode

akuntansi yang dipakai dapat diganti dengan syarat. Adapun syarat tersebut adalah metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu pengungkapan informasi harus dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat sangat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat tersebut dapat mengandung unsur kehati-hatian sehingga dalam laporan keuangan aset tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.1.5 Komponen-Komponen Laporan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas baik pemerintah pusat, kementerian negara/Lembaga, pemerintah daerah, dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat/daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua, laporan keuangan pokok terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan pula informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos- pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir.

- c. Neraca
Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional (LO)
Laporan ini bermanfaat untuk menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya, Laporan Operasional terdiri dari pendapatan operasional, beban, surplus/defisit dari operasi, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit laporan operasi.
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. (penerimaan dan pengeluaran kas tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan).
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan yang menyajikan sekurang-kurangnya ekuitas awal, surplus/defisit, laporan operasional, koreksi-koreksi yang langsung menambah /mengurangi ekuitas awal maupun akhir.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK ditujukan agar laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya.

2.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

2.2.1 Definisi Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk mengelola dana daerah perlu untuk memberikan akses kepada masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan nyaman, serta kecepatan yang wajar.

Menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti

pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (*internet*); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004).

Pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya agar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas. Pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan laporan keuangan ke DPRD tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar mengetahui dan memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 103 menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah dinyatakan bahwa “Informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat”. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya. Media publikasi laporan keuangan dapat melalui surat kabar, papan pengumuman, internet, atau dengan cara lainnya.

2.2.2 Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Yusriwanti (2021) menjelaskan bahwa menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional diperlukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi para pejabat pembuat kebijakan fiskal dalam membuat keputusan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh hasil pembangunan.

SIKD sebagai sebuah sistem juga pemerintah daerah harus memenuhi:

1. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.
2. Kemudahan, yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada stakeholder dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.
3. *Accesible*, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.3.1 Definisi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Mardiasmo (2016:20) menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Ulum (2010:40) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/IX/6/8/2003, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas.

Jadi, kesimpulan dari pengertian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat bahwa pertanggungjawaban diharapkan dapat menghambat keleluasaan wakil rakyat dan pegawai pemerintahan untuk menyimpang dari tanggungjawabnya sehingga penyalahgunaan dapat berkurang dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

2.3.2 Konsep Akuntabilitas

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pada tiap bagian. Tiap-tiap individu pada tiap-tiap klasifikasi bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*).

Akbar (2012:1-2) mengatakan akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Implikasinya kini keduanya menjadi bahasan yang marak dan *interchangeable*, penerapan pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang partisipatif sebagai suatu konsekuensi logis. Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hamper seluruh instansi

dan lembaga pemerintahan menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan konsep administrasi.

Menurut Sulistoni (2003:35) pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri- ciri sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan pemerintah.
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional dan;
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program kegiatan pemerintah.

2.3.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2004) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu Akuntabilitas vertikal dan Akuntabilitas horizontal.

Adapun jenis-jenis akuntabilitas publik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah. Dimana setiap pejabat atau petugas publik baik individu atau kelompok secara hirarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Melekat pada setiap lembaga negara sebagai satu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

2.3.4 Aspek-Aspek Akuntabilitas

Adapun penjelasan aspek-aspek akuntabilitas menurut Modul Diklat Prajabatan Golongan III (2015:8) yaitu:

- a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*)

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggungjawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dilain sisi, individu/kelompok/institusi bertanggungjawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggungjawab antara kedua belah pihak.

- b. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability is results-oriented*)

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/institusi dituntut untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.
- c. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability requires reporting*)

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
- d. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*)

Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggungjawab, dan tanggungjawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.
- e. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability improves performance*)

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja.

2.3.5 Indikator Akuntabilitas

Menurut Mudjiyono (2018) dimensi akuntabilitas sektor publik dibagi menjadi empat poin penting, antara lain:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
Akuntabilitas kejujuran merupakan perilaku untuk menghindari suatu tindakan penyimpangan kekuasaan. Sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan ketaatan pada hukum dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
Akuntabilitas proses merupakan prosedur administrasi, sistem informasi akuntansi dan manajemen sudah diterapkan dengan baik untuk melaksanakan tugas mengelola keuangan.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*)
Akuntabilitas program merupakan suatu pertimbangan tujuan dan program yang telah dilaksanakan sudah efektif dan efisien dimana hasil yang diperoleh sudah maksimal dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan.
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan semua kebijakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada DPR dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keempat dimensi sektor publik tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur tercapainya akuntabilitas pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2.4 Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelola Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara lebih lanjut memperjelas bahwa Laporan Keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan kuasa Pengguna Anggaran serta pengelola Bendahara Umum Daerah.

BPK RI dalam memberikan Opini atas Laporan Keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan UU Nomor 15 Tahun 2004 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Berdasarkan Penjelasan pasal 16 (ayat 1) UU No. 15 Tahun 2004, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam suatu laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,

pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Di samping itu, dalam pemberian opini BPK juga mempertimbangkan tingkat kesesuaian, kecukupan pengungkapan laporan keuangan dikaitkan dengan tingkat materialitas yang telah ditetapkan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. (Sujatmiko, 2019)

Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Sedang, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan selain dua jenis tersebut, termasuk disini adalah pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (*fraud*) atau korupsi, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain-lain. BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW), (<http://www.bpk.go.id:2015> diakses pada 12 Juni 2022).

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diberikan jika: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diberikan jika: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
- c. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), diberikan jika: terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.
- d. Adapun opini Tidak Wajar (TW), diberikan jika: system pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan

sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

2.5 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah pada pembahasan diatas yang tertuang dalam tabel di bawah ini dan sekaligus sebagai bahan referensi di mana untuk digunakan sebagai pengembangan penelitian untuk dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu meliputi variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Miftahul Reza Fauziyah dan Nur Handayani; 2017; Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah(X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah(X2), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah(Y).	Ordinal : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami Ordinal : 1. Keterbukaan 2. Kemudahan 3. <i>Accesible</i> Ordinal : 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	Metode analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini berupa beberapa uji statistik dan menggunakan analisis regresi linier berganda.	Hasil pengujian membuktikan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.	Nur Ahmad Hasan; 2017; Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah(X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah(X2), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah(Y).	Ordinal : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami Ordinal : 1. Keterbukaan 2. Kemudahan 3. <i>Accesible</i> Ordinal : 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3.	Mirza Mahsyur; 2017; Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan (X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah(X2), Pengendalian Internal (X3), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah(Y).	Ordinal : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami Ordinal : 1. Keterbukaan 2. Kemudahan 3. <i>Accesible</i> Ordinal : 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	Penelitian ini menggunakan regresi berganda analisis linier dengan SPSS versi 20.0. Penelitian ini menggunakan asumsi klasik uji normalitas, uji heterokedasitas, uji auto korelasi, uji multikolinearitas, serta untuk pengujian hipotesis menggunakan t.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pernyataan kota Dumai.

4.	Septa P, Arif H dan Ika Farida; 2018; Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan (X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y).	Ordinal : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami Ordinal : 1. Keterbukaan 1. Kemudahan 2. <i>Accesible</i> Ordinal : 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. kuntabilitas Kebijakan	Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier bergandaengan alat uji analisis SPSS.	Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Ponorogo.
5.	Dika Kurniawan dan Sri Rahayu; 2018; Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan (X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah(X2), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah(Y).	Ordinal : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami Ordinal : 1. Keterbukaan 2. Kemudahan 3. <i>Accesible</i> Ordinal : 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif, dan aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

6.	Nabila Ayu Indria; 2018; Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah(X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan(X2), Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah(Y).	Ordinal : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 1. Dapat dipahami Ordinal : 1. Keterbukaan 2. Kemudahan 3. <i>Accesible</i> Ordinal : 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, aksesibilitas berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah kabupaten Tasikmalaya.
7.	Nurul Quartina; 2018; Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah(X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan(X2), Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah(Y).	Ordinal : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami Ordinal : 1. Keterbukaan 2. Kemudahan 3. <i>Accesible</i> Ordinal : 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	Penelitian ini menggunakan metode uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Binjai. Sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

8.	Ni Luh Wulan Artini dan I Putu Deddy Samtika Putra; 2020; Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung.	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah(X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan(X2), Sistem Pengendalian Intern(X3), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah(Y).	Ordinal : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami Ordinal : 1. Terbuka di media massa 2. Mudah di akses 3. Ketersediaan informasi Ordinal : 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	Dalam penelitian digunakan uji validitas dan uji reliabilitas (digunakan tiga uji asumsi klasik yaitu : uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas) dan menggunakan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah di BPKPD Kabupaten Klungkung. Sedangkan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKPD Kabupaten Klungkung.
9.	Yusriwati; 2021; Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah(X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan(X2), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah(Y).	Ordinal : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami Ordinal : 1. Keterbukaan 2. Kemudahan 3. <i>Accesible</i> Ordinal : 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 26.	Penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan daerah kabupaten Indragiri Hilir dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Indragiri Hilir.

Sumber : Data diolah oleh Penulis, 2022

Dari penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yang meliputi independen, variabel dependen, periode data yang diteliti, metode yang digunakan dan lokasi penelitian. Dapat diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut, yaitu:

Tabel 2.2
Matriks Penelitian Terdahulu

Variabel	Dependen	
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	
Independen	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miftahul Reza Fauziyah dan Nur Handayani, 2017) (positif) 2. (Nur Ahmad Hasan, 2017) (positif) 3. (Mirza Mahsyur, 2017) (positif) 4. (Septa P, Arif H dan Ika Farida, 2018) (positif) 5. (Dika Kurniawan dan Sri Rahayu; 2018) (positif) 6. (Nabila Ayu Indria, 2018) (positif) 7. (Nurul Quartina, 2018) (positif) 8. (Ni Luh Wulan Artinidan I Putu Deddy Samtika Putra, 2020) (positif) 9. (Yusriwati, 2021) (positif) 	
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miftahul Reza Fauziyah dan Nur Handayani, 2017) (positif) 2. (Nur Ahmad Hasan, 2017) (positif) 3. (Mirza Mahsyur, 2017) (positif) 4. (Septa P, Arif H dan Ika Farida, 2018) (positif) 5. Dika Kurniawan dan Sri Rahayu; 2018) (positif) 6. (Nabila Ayu Indria, 2018) (positif) 7. (Yusriwati, 2021) (positif) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Nurul Quartina, 2018) 2. (Ni Luh Wulan Artini dan I Putu Deddy Samtika Putra, 2020)

Sumber : Data diolah oleh Penulis, 2022

2.5.2 Kerangka Pemikiran

2.5.2.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi

yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 diantaranya: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah berupa laporan keuangan daerah kepada pengguna laporan pemerintah. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Ahmad Hasan (2017) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan daerah. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Yusriwati (2021) yaitu bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Apabila proses penyajian laporan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan maka semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah yang baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah serta sangat diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.5.2.2 Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna

laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Dalam penelitiannya Nur Ahmad Hasan (2017) variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Yusriwati (2021) bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Jadi dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjawaban penggunaan aset daerah maupun kontrol terhadap kebijakan- kebijakan keuangan yang diambil pemerintah, baik kontrol yang dilakukan badan pemeriksa, masyarakat maupun investor. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.5.2.3 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 24 kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

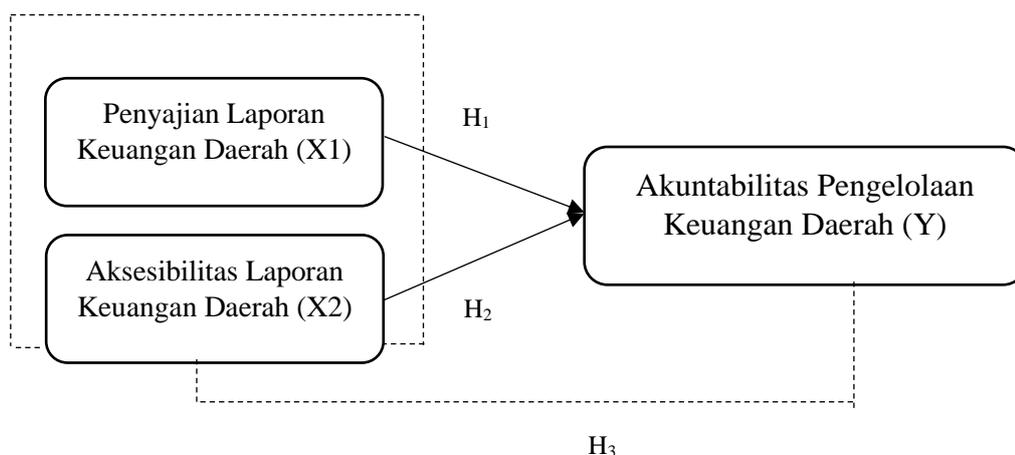
Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertical. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Tuntutan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat Penyajian Laporan Keuangan Daerah hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang

dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Berarti dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ahmad Hasan (2017) variabel penyajian laporan keuangan Daerah dan aksesibilitas laporan keuangan Daerah menunjukkan bahwa secara bersama-sama memiliki pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian Yusriwati (2021) penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Konstelasi Penelitian

- H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- H3: Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah verifikatif dengan metode penelitian *explanatory survey*. Jenis penelitian ini untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga memperoleh hasil yang dapat memperkuat hasil baru dari teori dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan metode *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena atau kesenjangan dalam bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menjelaskan tentang “Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor”.

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas sebagai variabel independen sedangkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan sebagai variabel dependen.

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fungsi komponen yang diteliti. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari: individu maupun kelompok tertentu dalam suatu organisasi/perusahaan/instansi.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh data primer, lokasi dalam penelitian ini adalah yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Dalam penelitian ini data primer berupa persepsi para responden atas berbagai pernyataan dalam kuesioner mengenai variabel yang terkait yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Bogor, oleh karena itu harus dilakukan suatu pengumpulan pendapat dari para responden dengan data yang valid. Pengumpulan data tersebut merupakan jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden dalam hal ini untuk diisi oleh pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada instansi Kabupaten Bogor dengan menggunakan Skala Ordinal.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi dibutuhkan untuk mengoperasikan variabel, sehingga menjadikan acuan dalam penggunaan instrumen penelitian untuk pengolahan data selanjutnya. Untuk mempermudah dalam proses analisis, maka peneliti terlebih dahulu mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok variabel yang digunakan peneliti meliputi:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Menurut Sugiyono (2017), Variabel Bebas (*Independen Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (*Dependen Variabel*). Maka dalam penelitian ini ada tiga variabel bebas yaitu Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas.

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Menurut Sugiyono (2017), Variabel Terikat (*Dependen Variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mengukur variabel bebas dan variabel terikat adalah dengan menggunakan Skala Likert yang ada pada kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2016), Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Skala pengukuran kuisisioner menggunakan skala:

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 3 = Netral (N)

Skor 4 = Setuju (S)

Skor 5 = Sangat Setuju (SS)

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	No. Butir Pertanyaan	Skala Pengukuran
1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah (Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pemerintahan daerah di atur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah	1. Relevan	1,2	Ordinal (Skala Likert)
	2. Andal	5,6,8	
	3. Dapat dibandingkan	3,4,7,9	
	4. Dapat dipahami	10	

Daerah upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dana, akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang berupa laporan keuangan).			
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (Pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya agar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas. Pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan laporan keuangan ke DPRD tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar mengetahui dan memperoleh laporan keuangan dengan mudah).	1. Keterbukaan laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.	11	Ordinal
	2. Kemudahan bagi pemerintah daerah dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.	12,13,14	
	3. <i>Stakeholder</i> dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui media massa.	15,16	
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat bahwa pertanggungjawaban diharapkan dapat menghambat keleluasaan wakil rakyat dan pegawai pemerintahan untuk Menyimpang dari tanggungjawabnya sehingga penyalahgunaan dapat berkurang dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik).	1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	19,20	Ordinal
	2. Akuntabilitas Proses	17,18,23	
	3. Akuntabilitas Program	22,24	
	4. Akuntabilitas Kebijakan	21,25	

Sumber:

1. (PSAP 01 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010)
2. (Yusriwati, 2021)
3. (Mudjiyono, 2018)

3.5 Metode Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012 hal 116). Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan, Staf Bagian Keuangan, Bendahara pada masing-masing BPKAD Kabupaten Bogor yang terkait dalam penelitian ini Sampel dapat diambil melalui cara-cara tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah *non probability sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Hanya elemen populasi yang memenuhi kriteria tertentu dari penelitian ini yang bisa dijadikan sampel penelitian. Adapun kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pegawai yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pegawai yang bekerja pada bagian bidang anggaran, bidang penatausahaan keuangan, bidang aset, bidang akuntansi dan yang berkaitan dengan masalah keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
3. Pegawai dengan masa jabatan minimal 1 tahun atau lebih

Penyampelan atas responden (pengguna laporan keuangan) dilakukan dengan teknik *proporsionate stratified random sampling*; yakni, suatu teknik pemilihan sampel yang apabila populasinya tidak (heterogen), yang terdiri dari beberapa kelompok dengan kategori yang berbeda. Menurut data dari BPKAD Kabupaten Bogor jumlah pegawai sebanyak 84 orang pada tahun 2022. Dalam menentukan jumlah besarnya sampel dari total populasi sebanyak 70 orang, maka digunakan rumus Slovin (Husein, 1999:59) seperti di bawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = Ukuran Populasi (sebanyak 84 orang)

e = Nilai kritis yang diinginkan sebesar 5%

Dari rumus diatas didapat angka sebagai berikut:

Sampel yang ditetapkan berjumlah 69,4 dibulatkan menjadi 70 orang.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan suatu data penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan

cara metode *survey* yang dimana peneliti memberikan pertanyaan dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner. Kuesioner tersebut didistribusikan oleh peneliti secara langsung kepada responden tanpa melalui perantara. Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk penelitian kuantitatif.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Statistik Deskriptif

Pada metode statistik deskriptif ini di mana proses untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan dalam kondisi sebenarnya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Statistik deskriptif pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi karakteristik variabel penelitian yang utama dan data responden. Analisis deskriptif dalam penelitian ini diolah dengan SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 25, yang merupakan sebuah *software* yang berfungsi untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistik, baik untuk statistik parametrik dan non- parametrik. Pengujian dilakukan untuk memperoleh hasil dari korelasi dan signifikansi dengan melakukan perhitungan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis yang digunakan untuk membandingkan hasil hubungan antar variabel.

3.7.2 Uji Kualitas Data

Dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner membutuhkan kesungguhan responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan dan faktor situasional merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas kuesioner yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat tergantung pada alat pengukur variabel yang akan diteliti. Alat ukur atau instrumen berupa kuesioner dikatakan memberikan hasil yang akurat dan stabil jika alat ukur itu dapat diandalkan. Jika alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data tidak andal atau tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian yang diperoleh tidak akan valid. Oleh karena itu dalam penelitian ini diperlukan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang diukur. Uji validitas yang dilakukan bertujuan untuk menguji seluruh item pernyataan yang valid dan yang tidak valid. Pada penelitian ini uji validitas menggunakan korelasi *bivariate* dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 25. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang digunakan untuk uji validitas pada penelitian ini yaitu dengan teknik korelasi *Pearson Product Moment*.

Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariante antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi *bivariate* dengan melihat output *Pearson Correlation*. Ghozali (2013) pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig.0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- 2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur andal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten atau tidaknya responden terhadap kuesioner-kuesioner penelitian. Dalam bukunya, (Sujarweni, 2014) menjelaskan bahwa uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pernyataan dalam angket (kuesioner) penelitian. Teknik yang digunakan untuk uji reliabilitas pada penelitian ini yaitu dengan teknik Cronbach's Alpha. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten.
- 2) Sementara, jika nilai Cronbach's Alpha $< 0,60$ maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terhadap model regresi digunakan agar dapat mengetahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik atau tidak. Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk menyatakan multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

1. Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2016) uji multikolinearitas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Persamaan model baik adalah yang tidak terdapat korelasi linear atau hubungan yang kuat antar variabel bebasnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), nilai dari *cut off* yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah:

Jika nilai VIF > 10 atau *tolerance* < 0,10 maka terjadi multikolonieritas. Jika nilai VIF < 10 atau *tolerance* > 0,10 maka tidak terjadi multikolonieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti varian variabel gangguan yang tidak konstan. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain hasilnya homoskedastisitas dimana variance residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Peneliti melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan *Scatterplots*. Berikut pedoman yang digunakan untuk memprediksi atau mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut dilakukan dengan cara melihat pola gambar *scatterplots* dengan ketentuan:

- Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
- Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, dengan jumlah variabel independen lebih dari satu. Regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Formulasi persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Akuntabilitas
a : Konstanta
b₁, b₂ : Koefisien regresi
X₁ : Penyajian Laporan Keuangan
X₂ : Aksesibilitas
e : *Disturbance error*

3.9 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol). Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan.

1. Uji Parsial (Uji t)

Menurut (Ghozali, 2016) mengungkapkan uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian yang digunakan adalah hipotesis satu arah dan menggunakan signifikan 5%. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria :

- H_0 : Jika $t_{tabel} < t_{hitung}$ dan nilai signifikan $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- H_a : Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji *Goodness of Fit* (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2016) Uji F disini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Prosedur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat bebas $(n - k)$, di mana n adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel.
- b. Kriteria keputusan :
 - H_0 : Uji Kecocokan model ditolak jika $\alpha > 0,05$
 - H_a : Uji Kecocokan model diterima jika $\alpha < 0,05$

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Pemerintah Kabupaten Bogor

Regentschap Buitenzorg (Kabupaten Bogor) adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Cibinong. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tangerang (Banten), Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara, Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi di selatan, serta Kabupaten Lebak (Banten) di barat. Kabupaten Bogor terdiri 40 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah kelurahan dan desa. 3 Juni adalah tanggal yang telah ditetapkan sebagai sejarah awal berdiri Kabupaten Bogor. Penetapan tanggal 3 Juni ini diilhami dari tanggal pelantikan Raja Pajajaran yang terkenal yaitu Sri Baduga Maharaja yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1482 selama sembilan hari yang disebut dengan upacara “Kedabhakti.”

Nama Bogor menurut berbagai pendapat bahwa kata Bogor berasal dari kata “*Buitenzorg*” nama resmi dari Penjajah Belanda. Pendapat lain berasal dari kata “Bahai” yang berarti Sapi, yang kebetulan ada patung sapi di Kebun Raya Bogor. Sedangkan pendapat ketiga menyebutkan Bogor berasal dari kata “Bokor” yang berarti tunggul pohon enau (kawung).

Dalam versi lain menyebutkan nama Bogor tertulis “*Hoofd Van de Negorij Bogor*” yang berarti kurang lebih Kepala Kampung Bogor. Kampung Bogor itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya Bogor yang mulai dibangun oleh C.G.K. Reinwardt pada tahun 1817.

Oleh Gubernur Jendral Gustaf Willem Baron van Imhoff Kampung Bogor ini dikembangkan pada tahun 1745, sehingga menjadi kesatuan masyarakat yang berkembang menjadi besar di waktu kemudian. Kesatuan masyarakat itulah yang menjadi inti masyarakat Kabupaten Bogor.

Kini, Pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, telah dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Maka dari itu pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Bogor menempati Kantor Pemerintahan di Cibinong sejak tahun 1990.

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Bogor

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas ± 2.664 km². Secara geografis terletak di antara 6°18'6"47"10 Lintang Selatan dan 106°23'45"-107°13'30 Bujur Timur, dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relative rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, dengan batas-batas wilayah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi;
2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak;
3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta;
4. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur;
5. Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Bogor.

4.1.3 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bogor

1. Visi
“Mewujudkan Kabupaten Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”
2. Misi
 - a. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas,
 - b. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan,
 - c. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan,
 - d. Mewujudkan Kesalehan Sosial,
 - e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik.

4.1.4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPKAD Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bogor maka misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD yaitu misi yang ke-5 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan tujuan “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi”. Indikator sasaran yang ditetapkan yaitu Opini BPK

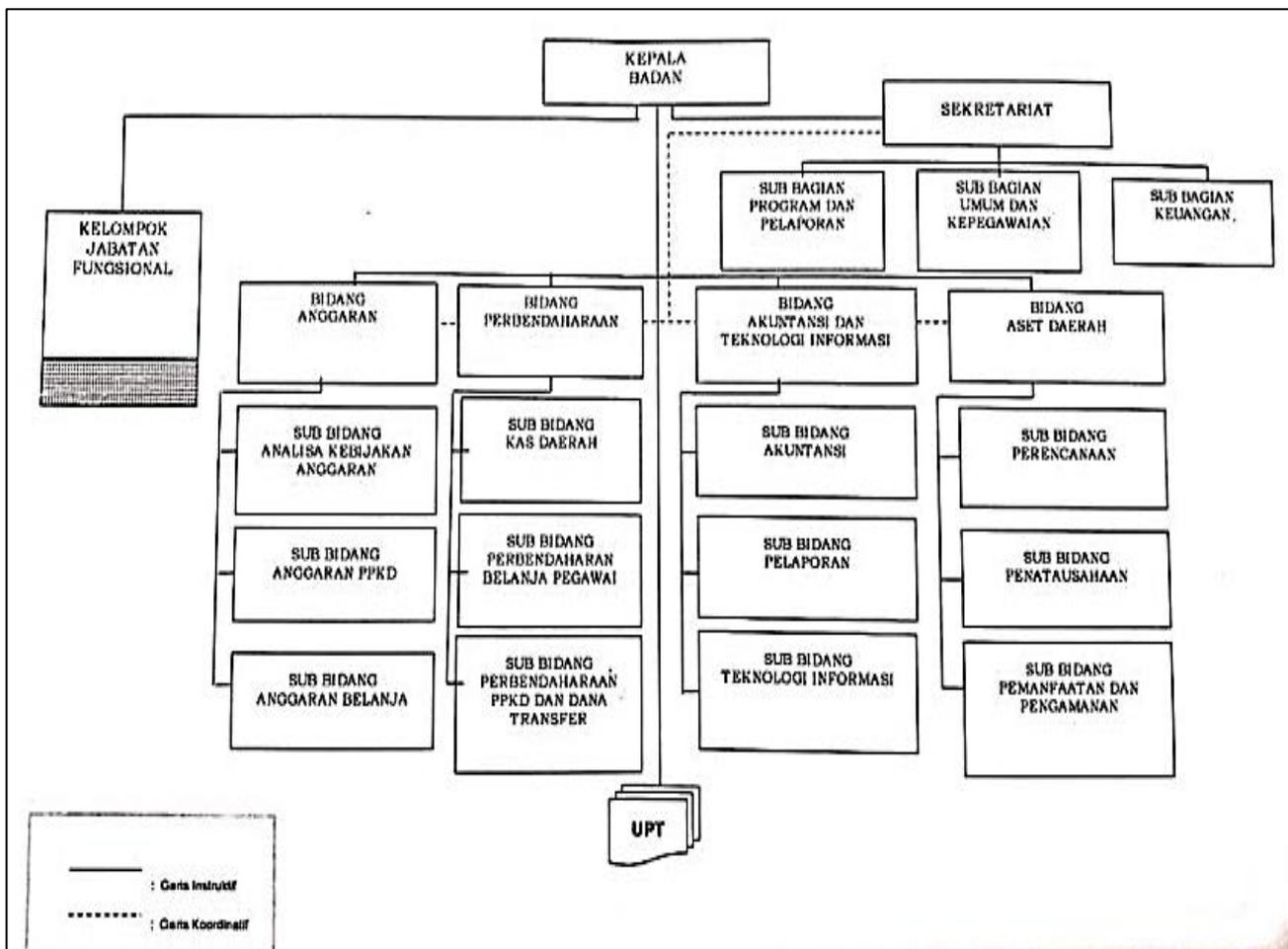
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditargetkan “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka strategi yang dilakukan oleh BPKAD adalah “Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah” dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Perencanaan Keuangan yang Transparan serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel;
2. Efektivitas Perencanaan dan Penatausahaan serta Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.

Adapun ruang lingkup dalam BPKAD Kabupaten Bogor sebagai berikut:

1. Sekretariat
Bertugas melaksanakan pengelolaan kesekretariatan badan yang meliputi:
a. pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan badan; b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian badan; c. pengelolaan keuangan badan.
2. Bidang Anggaran
Bertugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran daerah yang meliputi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis anggaran pemerintah daerah; b. pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD; c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rancangan anggaran belanja daerah.
3. Bidang Perbendaharaan
Bertugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan yang meliputi: a. pengelolaan kas daerah; b. pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai; c. pengelolaan anggaran PPKD.
4. Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
Bertugas melaksanakan akuntansi dan teknologi informasi pelaporan keuangan daerah yang meliputi: a. menyiapkan dan menyusun akuntansi keuangan daerah; b. pengelolaan pelaksanaan pelaporan keuangan daerah; c. pengelolaan teknologi informasi keuangan daerah.
5. Bidang Aset Daerah
Bertugas melaksanakan pengelolaan barang daerah yang meliputi: a. analisis perencanaan barang milik daerah; b. penatausahaan dan administrasi barang milik daerah; c. pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.

4.1.5 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Bogor



Gambar 4.1

Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Bogor

Sumber: Data diolah oleh Kantor BPKAD Kabupaten Bogor

4.1.6 Hasil Pengumpulan Data

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada kantor BPKAD Kabupaten Bogor yang dilaksanakan sejak 1 Desember 2022 sampai selesai. Menurut data dari BPKAD Kabupaten Bogor jumlah pegawai sebanyak 84 orang pada tahun 2022. Dalam menentukan jumlah besarnya sampel dari total populasi sebanyak 70 orang atau sebanyak 83% dari jumlah pegawai. Maka pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada Kantor BPKAD sebanyak 70 eksamplar. Kuesioner tersebut dibagikan kepada pegawai yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel pada penelitian ini antara lain:

1. Pegawai yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pegawai yang bekerja pada bagian bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang aset, bidang akuntansi dan yang berkaitan dengan masalah keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
3. Pegawai dengan masa jabatan minimal 1 tahun atau lebih.

Jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat digunakan sebanyak 70 eksamplar, atau tingkat pengembalian data kuesioner sebanyak 100%. Adapun rincian dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rincian Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	70
Kuesioner yang Kembali	70
Kuesioner yang dapat digunakan	70
Kuesioner yang tidak kembali (70-70)	0
Tingkat pengembalian kuesioner (70/70 x 100%)	100%
Tingkat pengembalian yang digunakan (70/70 x 100%)	100%

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui kuesioner-kuesioner yang dibagikan sebanyak 70 kuesioner. Setelah melalui pengecekan tidak ada kuesioner yang tak lengkap pengisiannya sehingga seluruh kuesioner dapat digunakan. Tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%, dihitung dari persentase jumlah kuesioner yang kembali tanpa memperhitungkan kelayakan responden (70 kuesioner) dibagi total yang dikirim (70 kuesioner). Tingkat pengembalian kuesioner yang dapat digunakan sebesar 100%, dihitung dari persentase jumlah kuesioner dengan memperhitungkan kelayakan responden (70 kuesioner) dibagi dengan total kuesioner yang dikirim (70 kuesioner).

4.1.7 Deskripsi Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 70 orang staf atau pegawai pada SKPKD di Bagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor terdapat data yang variatif, khususnya data identitas responden yang meliputi : jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jabatan dan masa kerja. Keempat kategori tersebut secara tidak langsung menunjukkan bagaimana peranan terhadap kinerja dan kualitas SDM dalam sebuah instansi terutama dalam proses penyelesaian sebuah masalah dan pelaporan kinerja dari instansi tersebut. Adapun distribusi responden berdasarkan karakteristik responden disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan berikut ini:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.2

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	Laki-laki	37	53%
2.	Perempuan	33	47%
	Total	70	100%

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh responden laki-laki yang berjumlah 37 orang dengan tingkat presentase sebesar 53% dan sisanya perempuan yang berjumlah 33 orang dengan tingkat presentase sebesar 47%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan usia dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.3

Identitas Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	<20 Tahun	-	-
2.	20-30 tahun	4	6%
3.	31-40 tahun	13	19%
4.	41-50 tahun	36	51%
5.	>50 tahun	17	24%
	Total	70	100%

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa umur responden dalam penelitian sebagian besar responden memiliki usia 41-50 Tahun. Responden yang memiliki usia 20-30 Tahun sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase sebesar 6%, 31-40 Tahun sebanyak 13 orang dengan tingkat persentase sebesar 19%, 41-50 Tahun sebanyak 36 orang dengan tingkat persentase sebesar 51%, dan >50 Tahun sebanyak 17 orang dengan tingkat persentase sebesar 24%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.4

Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	SLTA	-	-
2.	D3	1	1%
3.	D4	1	1%

4.	S1	43	61%
5.	S2	25	36%
	Total	70	100%

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.4, terlihat bahwa responden dengan pendidikan terakhir Strata satu lebih mendominasi yaitu dengan jumlah 43 responden dengan tingkat presentase sebesar 61%, selanjutnya 1 responden memiliki Pendidikan Diploma 3 dengan tingkat presentase 1%, 1 responden memiliki Pendidikan Diploma 4 dengan tingkat presentase 1%, dan 25 responden memiliki Pendidikan Strata dua dengan tingkat presentase sebesar 36%.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan jabatan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.5

Identitas Responden Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	Sekretariat	12	17%
2.	Bidang Akuntansi	10	14%
3.	Bidang Anggaran	11	16%
4.	Bidang Aset Daerah	17	24%
5.	Bidang Perbendaharaan	20	29%
	Total	70	100%

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa dari 70 orang responden yang mengisi kuesioner terdiri dari 12 orang dengan tingkat presentase 17% pada bidang Sekretariat, 10 orang dengan tingkat presentase 14% pada bidang Akuntansi, 11 orang dengan tingkat presentase 16% pada bidang Anggaran, 17 orang dengan tingkat presentasi 24% pada bidang Aset Daerah, dan 20 orang dengan tingkat presentase 29% pada bidang Perbendaharaan.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan masa kerja dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.6

Identitas Responden Berdasarkan Masa Kerja

No.	Masa Kerja	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	>1-5 tahun	5	7%
2.	>6-10 tahun	11	16%
3.	>10 tahun	54	77%
	Total	70	100%

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.6, terlihat bahwa responden yang masa kerjanya 1-5 tahun sebanyak 5 orang dengan tingkat presentase 7%, selanjutnya yang masa kerjanya 6-10 tahun sebanyak 11 orang dengan tingkat presentase 16% dan yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun sebanyak 54 orang dengan tingkat presentase 77%.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Deskripsi dan Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian berikut ini menampilkan jawaban responden dalam bentuk distribusi frekuensi. Deskripsi ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap masing-masing indikator dan variabel yang di gunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui kondisi masing-masing variabel tersebut secara umum. Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat yaitu Penyajian laporan keuangan Daerah (X1), Aksesibilitas laporan keuangan (X2), dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.7

Hasil Kuesioner Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No. Pertanyaan	Penilaian Responden										Jumlah Responden	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Responden	%
1	0	0	0	0	0	0	24	34,3%	46	65,7%	70	100
2	0	0	0	0	0	0	20	28,6%	50	71,4%	70	100
3	0	0	0	0	0	0	30	42,9%	40	57,1%	70	100
4	0	0	1	1,4%	1	1,4%	25	35,7%	43	61,4%	70	100
5	0	0	0	0	0	0	28	40,0%	42	60,0%	70	100
6	0	0	0	0	0	0	25	35,7%	45	64,3%	70	100
7	0	0	0	0	0	0	32	45,7%	38	54,7%	70	100
8	0	0	0	0	0	0	30	42,9%	40	57,1%	70	100
9	0	0	0	0	0	0	32	45,7%	38	54,3%	70	100
10	0	0	0	0	0	0	31	44,3%	39	55,7%	70	100
Presentase	0	0	1	0,1	1	0,1	277	27,7	421	42,1	70	100

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa responden yang memberikan jawaban paling banyak persentasenya adalah pernyataan pertama sebesar 65,7% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara lengkap, pernyataan kedua sebesar 71,4% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan keuangan diselesaikan secara tepat waktu, pernyataan ketiga sebesar 57,1% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan keuangan memungkinkan pengguna mengkoreksi aktivitas keuangan di masa lalu, pernyataan keempat sebesar 61,4% menunjukkan bahwa informasi laporan keuangan membantu pengguna

memprediksi kejadian masa kini, pernyataan kelima sebesar 60,0% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa informasi dari laporan keuangan menggambarkan transaksi secara wajar dan jujur, pernyataan keenam sebesar 64,3% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, pernyataan ketujuh, sebesar 54,7% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, pernyataan kedelapan sebesar 57,1% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat dijadikan tolak ukur dalam anggaran berikutnya, pernyataan kesembilan sebesar 54,3% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan pedoman pada SAP, pernyataan kesepuluh sebesar 55,7% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna.

Tabel 4.8
Hasil Kuesioner Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

No. Pertanyaan	Penilaian Responden										Jumlah Responden %	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	1	1,4%	11	15,7%	3	4,3%	33	47,1%	22	31,4%	70	100
2	0	0	9	12,9%	5	7,1%	30	42,9%	26	37,1%	70	100
3	1	1,4%	1	1,4%	7	10,0%	40	57,1%	21	30,0%	70	100
4	1	1,4%	0	0	12	17,1%	31	44,3%	26	37,1%	70	100
5	1	1,4%	0	0	14	20,0%	38	54,3%	17	24,3%	70	100
6	0	0	1	1,4%	8	11,4%	32	45,7%	29	41,4%	70	100
Presentase	4	0,4	22	2,2	49	4,9	204	20,4	141	14,1	70	100

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa responden yang memberikan jawaban paling banyak persentasenya adalah pernyataan pertama sebesar 47,1% menjawab Setuju (S) menunjukkan bahwa laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, pernyataan kedua sebesar 42,9% menjawab Setuju (S) menunjukkan bahwa pengguna dapat dengan mudah memperoleh informasi laporan keuangan daerah, pernyataan ketiga sebesar 57,1% menjawab Setuju (S) menunjukkan bahwa pengguna dapat mengakses laporan keuangan melalui internet (*website*), pernyataan keempat sebesar 44,3% menjawab Setuju (S) menunjukkan bahwa laporan keuangan memuat informasi yang wajar terpublikasi, pernyataan kelima sebesar 54,3% menjawab Setuju (S) menunjukkan bahwa laporan keuangan sudah dapat diakses dimanapun dan kapanpun, pernyataan keenam sebesar 45,7% menjawab Setuju (S) menunjukkan bahwa seluruh pengguna laporan keuangan memiliki kemudahan akses yang sama.

Tabel 4.9
Hasil Kuesioner Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No. Pertanyaan	Penilaian Responden										Jumlah	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	Responden	%
1	0	0	0	0	6	8,6%	24	34,3%	40	57,1%	70	100
2	0	0	0	0	0	0	28	40,0%	42	60,0%	70	100
3	0	0	0	0	0	0	26	37,1%	44	62,9%	70	100
4	0	0	0	0	0	0	27	38,6%	43	61,4%	70	100
5	0	0	0	0	0	0	41	58,6%	29	41,4%	70	100
6	0	0	0	0	11	32,9%	23	51,4%	36	51,4%	70	100
7	0	0	0	0	0	0	26	37,1%	44	62,9%	70	100
8	0	0	0	0	0	0	25	35,7%	45	64,3%	70	100
9	0	0	0	0	0	0	22	31,4%	48	68,6%	70	100
Presentase	0	0	0	0	17	1,7	242	24,2	371	37,1	70	100

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa responden yang memberikan jawaban paling banyak persentasenya adalah pernyataan pertama sebesar 57,1% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan keuangan APBD disusun menggunakan pendekatan kinerja, pernyataan kedua sebesar 60,0% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa rancangan APBD yang disampaikan pemerintah kepada DPRD mendapat persetujuan, pernyataan ketiga sebesar 62,9% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa pendapatan daerah diserahkan tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan dan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, pernyataan keempat sebesar 61,4% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, pernyataan kelima sebesar 58,6% menjawab Setuju (S) menunjukkan bahwa tersedianya sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang dicapai pemerintah, pernyataan keenam sebesar 51,4% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan yang dibuat oleh pelaksana kebijakan anggaran di review oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK, pernyataan ketujuh sebesar 62,9% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan keuangan diperiksa oleh BPK untuk dilakukan pemeriksaan, pernyataan kedelapan sebesar 64,3% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan keuangan dilakukan finansial audit untuk dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat, pernyataan kesembilan sebesar 68,8% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa indicator hasil kerja yang dirancang untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah.

4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Agar mengetahui validitas konstruk suatu instrumen atau alat pengukur adalah dengan mengkorelasikan skor atau nilai yang diperoleh pada masing-masing pertanyaan atau pernyataan dari semua responden dengan skor atau nilai total semua pertanyaan atau pernyataan dari semua responden. Tingkat validitas item diketahui dengan membandingkan nilai r_{xy} dengan nilai r_{tabel} . dihitung dengan *degree of freedom* (df) = $N-2$, sehingga $df = 70-2=68$, $n(0,05;68)$ yaitu 0,235. Apabila $r_{xy} > r_{tabel}$ maka item tersebut valid dan sebaliknya apabila $r_{xy} < r_{tabel}$ maka item kuesioner dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas dengan teknik *pearson correlation* serta uji reliabilitas menggunakan teknik *cronbach alpha* diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No.	<i>Pearson Correlation</i>	R_{tabel}	Batas Sign	Keterangan
1.	0,881	0.235	0,05	Valid
2.	0,843	0.235	0,05	Valid
3.	0,753	0.235	0,05	Valid
4.	0,828	0.235	0,05	Valid
5.	0,777	0.235	0,05	Valid
6.	0,791	0.235	0,05	Valid
7.	0,881	0.235	0,05	Valid
8.	0,878	0.235	0,05	Valid
9.	0,722	0.235	0,05	Valid
10.	0,848	0.235	0,05	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2023

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah dari item_1 sampai item_10 tersebut valid/layak digunakan sebagai instrumen penelitian, karena nilai r_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan r_{tabel} *product moment*. Tabel 4.10 menunjukkan hasil uji validitas penyajian laporan keuangan daerah.

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

No.	<i>Pearson Correlation</i>	R_{tabel}	Batas Sign	Keterangan
1.	0,820	0.235	0,05	Valid
2.	0,861	0.235	0,05	Valid
3.	0,604	0.235	0,05	Valid
4.	0,753	0.235	0,05	Valid

5.	0,873	0.235	0,05	Valid
6.	0,864	0.235	0,05	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2023

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dari item_1 sampai item_6 tersebut valid/layak digunakan sebagai instrumen penelitian, karena nilai r_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan r_{tabel} *product moment*. Tabel 4.11 menunjukkan hasil uji validitas aksesibilitas laporan keuangan daerah.

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	<i>Pearson Correlation</i>	R_{tabel}	Batas <i>Sign</i>	Keterangan
1.	0,908	0.235	0,05	Valid
2.	0,849	0.235	0,05	Valid
3.	0,912	0.235	0,05	Valid
4.	0,901	0.235	0,05	Valid
5.	0,883	0.235	0,05	Valid
6.	0,917	0.235	0,05	Valid
7.	0,816	0.235	0,05	Valid
8.	0,801	0.235	0,05	Valid
9.	0,803	0.235	0,05	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2023

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dari item_1 sampai item_9 tersebut valid/layak digunakan sebagai instrumen penelitian, karena nilai r_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan r_{tabel} *product moment*. Tabel 4.12 menunjukkan hasil uji validitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur andal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan metode *Cronbach's Alpha*. Nilai $\alpha > 0,60$ dikategorikan sebagai reliabel atau konsisten dan $\alpha < 0,60$ dikategorikan sebagai tidak reliabel dan tidak konsisten. Hasil reliabilitas dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13

Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	r_{tabel}	Keterangan
1.	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	0,945	0,60	Reliabel
2.	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	0,883	0,60	Reliabel

3.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,957	0,60	Reliabel
----	---	-------	------	----------

Sumber: Data primer diolah, 2023

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* atas variabel penyajian laporan keuangan daerah sebesar 0,945, variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah sebesar 0,883, dan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 0,957, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner reliabel dan konsisten karena mempunyai *Cronbach Alpha* > 0,60.

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian *normalitas* dilakukan dengan *Kolmogorov Smirnov* dan kurva normal *probability plot*. Jika menggunakan alat uji analisis metode *Kolmogorov Smirnov*. Uji ini digunakan untuk membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikan 0,05. Apabila nilai *sign* hitung > 0,05 maka data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas dengan alat uji analisis metode *Kolmogorov Smirnov* diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual		
Sumber: diolah,	N		70	
	Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	Data primer 2023
		Std. Deviation	4.09891135	
	Most Extreme Differences	Absolute	.079	
		Positive	.074	
		Negative	-.079	
	Test Statistic		.079	
	Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	

a. Test distribution is Normal.

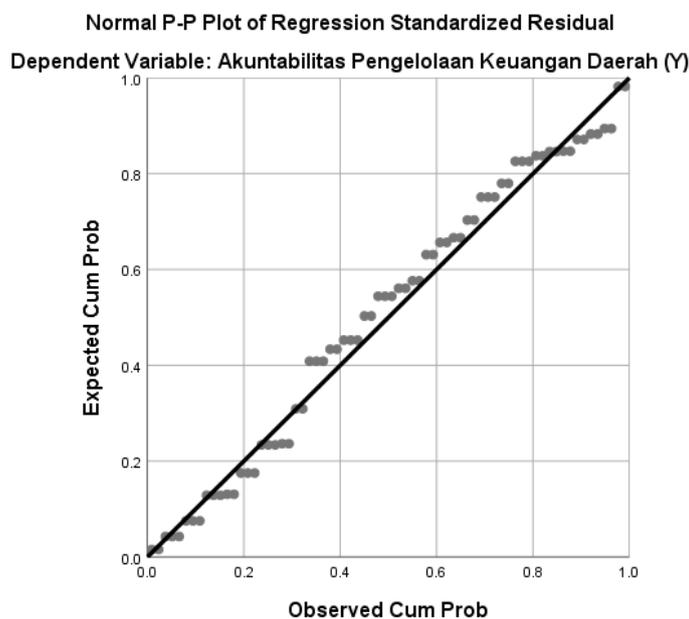
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *kolmogorov smirnov* test untuk *Unstandardized Residual* sebesar 0,079 dengan alpha 5% perbandingan antara *alpha* dengan standar signifikansi yang sudah ditentukan diketahui bahwa nilai *sig* > *alpha* maka artinya distribusi residual normal. Dan disini terbukti jika *Asymp Sig* Sebesar 0,200 lebih besar dari alpha 5% (0,05) sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian normal.

Selanjutnya untuk uji normalitas data menggunakan kurva normal *probability plot* dengan ketentuan jika titik-titik pada grafik menyebar dan terhimpit mengikuti sekitar garis diagonal maka data yang digunakan berdistribusi secara normal. Adapun hasil uji normalitas data kurva normal *probability plot*, sebagai berikut:



Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data primer diolah, 2023

Pada gambar diatas diketahui bahwa data dengan *Normal P-P Plot* pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang digunakan dinyatakan berdistribusi normal atau mendekati normal. Hal tersebut dikarenakan titik-titik pada gambar distribusi terlihat menyebar atau mendekati di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah dengan mengikuti garis diagonal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), nilai dari *cut off* yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas. Jika nilai $VIF > 10$ atau $tolerance < 0,10$ maka terjadi multikolonieritas. Jika nilai $VIF < 10$ atau $tolerance > 0,10$ maka tidak terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2016). Hasil yang didapat bisa dilihat pada tabel 4.15. sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolinearitas

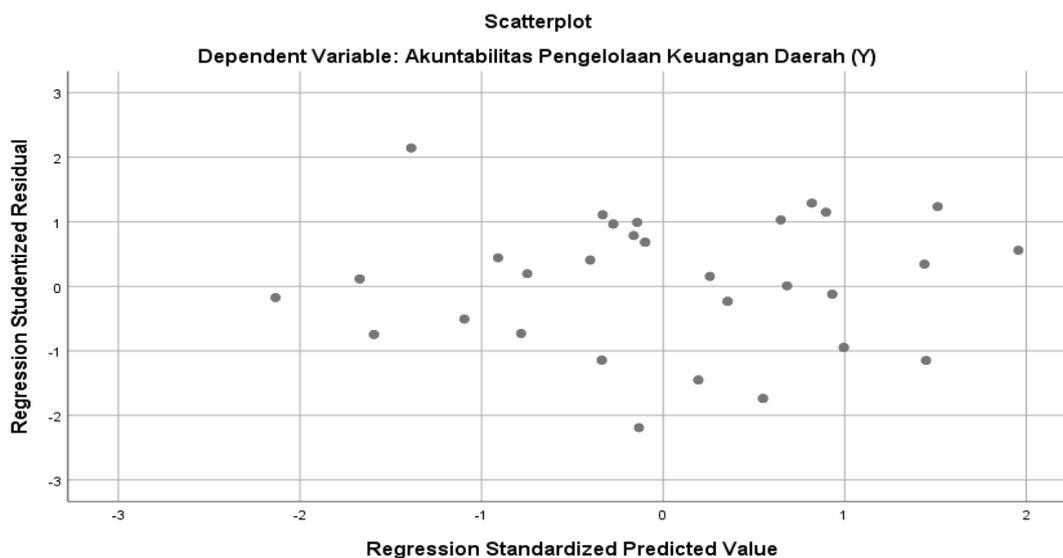
No.	Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
1.	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	2,149	0,465	Tidak ada masalah <i>Multikolinearitas</i>
2.	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	2,149	0,465	Tidak ada masalah <i>Multikolinearitas</i>

Sumber: Data primer diolah, 2023

Dari hasil pengujian *multikolinearitas* pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa semua variabel yaitu penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah mempunyai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10. Dengan melihat hasil pengujian *multikolinearitas* di atas, diketahui bahwa tidak ada satupun dari variabel bebas yang mempunyai mempunyai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dari kedua variabel tersebut.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian *heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian *heteroskedastisitas* dilakukan dengan grafik *scatterplot* dan uji *glesjer*. Pengujian *heteroskedastisitas* menggunakan grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Model regresi yang baik adalah *homoskedastisitas* atau tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Berikut adalah gambar uji *heteroskedastisitas* dengan grafik *scatterplot*:



Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dalam suatu model regresi yang baik, biasanya tidak mengalami *heteroskedastisitas*. Melalui grafik *scatterplot* dapat terlihat suatu model regresi mengalami *heteroskedastisitas* atau tidak. Jika terdapat pola tertentu dalam grafik maka mengindikasikan telah terjadi *heteroskedastisitas*. Dari Gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi dalam penelitian ini.

Dalam analisis grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang digunakan adalah dengan Uji *Glejser* melalui regresi nilai absolute residual dengan variabel independennya. Nilai *sig* dibandingkan dengan 0.05. hasil statistik dapat dilihat di tabel 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Heteroskedastisitas

No.	Variabel	Sig	Keterangan
1.	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	0,409	Tidak adanya gejala <i>Heteroskedastisitas</i>
2.	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	0,084	Tidak adanya gejala <i>Heteroskedastisitas</i>

Sumber: Data primer diolah, 2023

Tabel 4.16 diatas menunjukkan semua nilai signifikansi variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki nilai *sig* lebih besar dari 0,05, sehingga variabel-variabel independen tersebut dapat dinyatakan tidak terjadi gejala *heteroskedastisitas*.

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Hasil dari uji akan menunjukkan apakah ada penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada tabel 4.17 dibawah ini:

Tabel 4.17
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.969	2.381		1.247	.217
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	.599	.089	.671	6.740	.000
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	.329	.161	.204	2.045	.045

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui model regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 2,969 + 0,599X1 + 0,329X2 + e$$

Pada persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa nilai konstanta (Y) sebesar 2,969 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka akan terjadi kenaikan akuntabilitas sebesar 2,969. Nilai koefisien (X1) untuk variabel penyajian laporan keuangan memiliki koefisien regresi sebesar 0,599 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan maka akan meningkatkan variabel akuntabilitas sebesar 0,599. Nilai koefisien (X2) untuk variabel aksesibilitas sebesar 0,329 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan maka akan menaikkan variabel akuntabilitas sebesar 0,329.

4.2.5 Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independent (Y) secara serentak terhadap variabel dependen (X1) dan (X2). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Hasil dari uji koefisien determinasi (R^2) dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.831a	.691	.682	4.160
a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2), Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)				
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)				

Sumber: Data primer diolah, 2023

Tabel 4.18 di atas menunjukkan nilai *R Square* adalah 0,691 atau 69,1%. Maka penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dapat menjelaskan 69,1% variasi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sisanya 30,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Sedangkan, *Adjusted R-square* sebesar 0,682 ini menunjukkan pengaruh variabel Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas sebesar 68,2%.

2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Hal ini berarti bahwa probabilitas akan mendapatkan nilai t yang terletak di daerah kritis (daerah tolak) apabila hipotesis benar sebesar 0,05. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima., berarti ada pengaruh antara variabel.

t_{tabel} dicari dengan signifikansi $0.05/2 = 0.025$ dengan tingkat derajat kebebasan $df = n - k - 1$ atau $df = 70 - 2 - 1 = 67$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen) maka t_{tabel} menggunakan one tailed sebesar 1,996.

Berikut hasil uji signifikansi parsial (uji statistik t) dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang disajikan pada Tabel 4.19

Tabel 4.19
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.969	2.381		1.247	.217
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	.599	.089	.671	6.740	.000
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	.329	.161	.204	2.045	.045

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.19, hasil uji parsial (uji t), yaitu sebagai berikut:

a. Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Hasil analisis uji t untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $6,740 > t_{tabel}$ 1,996 dengan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil analisis uji t untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $2,045 > t_{tabel}$ 1,996 dengan nilai probabilitas sebesar $0,045 < 0,05$ maka H_1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Hasil Uji Signifikan Simultan (F)

Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik F adalah jika nilai signifikansi f_{tabel} , maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

f_{tabel} dapat diketahui sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 f_{tabel} &= df1 = k-1 ; df2 = n-k \text{ (k adalah jumlah variabel X + variabel Y)} \\
 &= df1 = 3-1 ; df2 = 70-3 \\
 &= df1 = 2 ; df2 = 67 \\
 f_{tabel} &= 3,13
 \end{aligned}$$

Tabel 4.20
Hasil Uji Signifikan Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2594.512	2	1297.256	74.975	.000 ^b
	Residual	1159.274	67	17.303		
	Total	3753.786	69			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)
b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2), Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.20 diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian menunjukkan hasil F_{hitung} sebesar 74,975 dengan signifikan 0,000 atau kurang dari 0,05. Nilai F_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} (pada df 2;67) yaitu $74,975 > 3,13$ maka model regresi yang digunakan sudah tepat atau fit, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbukti dan diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah dan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh penulis pada 70 pegawai BPKAD Kabupaten Bogor dengan menggunakan *Software Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 25 tentang pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut hasil hipotesis penelitian:

Tabel 4.21
Hasil Hipotesis Penelitian

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterima
H ₂	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterima
H ₃	Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterima

4.3.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji secara parsial maka penyajian laporan keuangan sebagai variabel independen (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen (Y). Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar 6.740 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.996, yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka H₁ diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari daerah atas wewenang yang diberikan kepadanya, apabila proses penyajian laporan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan maka semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Ahmad Hasan (2017) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Gowa menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Fahmi (2020) yang berjudul pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten Palopo yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.3.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji secara parsial maka aksesibilitas sebagai variabel independen (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen (Y). Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar 2.045 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.996, yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi 0.045 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka H_2 diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya semakin baik aksesibilitas laporan keuangan daerah, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Selain menyajikan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengakses laporan keuangan daerah, agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik.

Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka publik (badan pemeriksa, masyarakat maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mirza Masyhur (2017) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Kota Dumai menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Yusriwati (2021) yang berjudul pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir yang

menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.3.3 Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji secara simultan maka penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai variabel independen (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen (Y). Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai f_{hitung} sebesar 74.975 dan nilai f_{tabel} sebesar 3.13, yang artinya $f_{hitung} > f_{tabel}$ dengan signifikansi 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka H_3 diterima.

Hal ini berarti apabila laporan keuangan yang disajikan sesuai dan aksesibilitas laporan keuangan secara lengkap mudah didapat dan diterapkan secara bersama-sama maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik serta terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Adanya laporan keuangan lengkap dan akses laporan keuangan yang baik dibuat pemerintah maka informasi akan laporan keuangan semakin mudah didapat, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik.

Lucy dkk (2013) mengatakan bahwa hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Tuntutan masyarakat yang muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2002 (pasal 103) dikatakan bahwa Informasi yang termuat dalam sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 101 merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa keuangan Daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah Daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan Daerah kepada masyarakat yang dapat diketahui secara terbuka dan jujur melalui media tertentu.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil pengujian regresi, diketahui bahwa pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah baik secara individu maupun secara bersama-sama atau serempak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurul Quartina (2018) tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Binjai. Nabila Indria (2018) tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Tasikmalaya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Bogor. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan pembahasan yang telah peneliti bahas di bab sebelumnya penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Penyajian Laporan Keuangan Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan H_1 diterima. Hal ini terbukti dengan nilai uji signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,740 > 1,996$). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan daerah maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik. Penyajian laporan keuangan secara lengkap dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), maka akan tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Hasil penelitian Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan H_2 diterima. Hal ini terbukti dengan nilai uji signifikansi sebesar $0,045 < 0,05$ atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,045 > 1,996$). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin mudah akses terhadap laporan keuangan daerah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik.
3. Hasil penelitian Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan H_3 diterima.. Hal ini terbukti dengan nilai uji signifikansi $0,000$ serta nilai F_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} (pada df 2;67) yaitu $74,975 > 3,13$. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang tidak disertakan dalam penelitian. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji koefisien sebesar 69,1% variasi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sedangkan sisa dari presentase yang tidak diteliti sebesar 30,9%, yaitu pengawasan keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kota Bogor, maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

- 1) Bagi instansi pemerintah Kabupaten Bogor
 - a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, terus tingkatkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Bogor agar mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai visi misi.
 - b. Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan disajikannya informasi laporan keuangan dengan baik dan memenuhi karakteristik pelaporan dan standar akuntansi pemerintahan maka akan membantu pengguna khususnya BPKAD sendiri dalam mengkoreksi dan memprediksi kejadian masa kini.
 - c. Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, bagi laporan keuangan yang dipublikasikan secara media massa terutama internet (*website*) lebih dipermudah agar terciptanya kontrol baik yang dilakukan oleh BPK, masyarakat maupun investor.
 - d. Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, dikarenakan pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat maka laporan keuangan harus akuntabilitas, dengan demikian pemerintah kabupaten Bogor mengecek kembali (*me-review*) laporan keuangan tersebut sebelum diserahkan kepada BPK. Hal ini menunjukkan bahwa program/kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan efektifitas.
- 2) Bagi Peneliti selanjutnya
 - a. Bagi peneliti berikutnya disarankan menambah variabel lain seperti transparansi karena pemerintah harus memberikan informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan.
 - b. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk meneliti Instansi mencakup SKPD Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor lainnya agar mendapatkan hasil yang berbeda dan responden yang didapatkan akan lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. 2012. Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah. Artikel. *Fordfoundation. Public Interest Research and Advocacy Center*. Hal 1-2.
- Andi. 2012. Opini Audit BPK Sebagai Indikator Akuntabilitas Pemerintah. Tersedia di <http://akuntansi-pemerintah.blogspot.co.id/2012/06/> [diakses pada 12 Juli 2022]
- Antara News Megapolitran. Tersedia di <https://megapolitan.antaranews.com> [diakses pada 3 Januari 2023]
- BPK Republik Indonesia. 2020. Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat. Tersedia di: <https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/> [diakses pada 10 Juni 2022]
- BPK Republik Indonesia. Tersedia di <http://www.bpk.go.id/news> [diakses pada 12 Juli 2022]
- Fahmi. 2020. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palopo. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Fauziah, MR dan Nur Handayani. 2017. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, [online] Volume 6(6). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1236> [diakses pada 20 Juni 2022]
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 7. BP: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hasan, Nur Ahmad. 2017. Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Indria, Nabila. 2018. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jurnal Jabar. Tersedia di <https://www.jurnaljabar.id> [diakses pada 10 Juni 2022].
- Kompas.id. Tersedia di <https://www.kompas.id/> [diakses pada 10 Juni 2022].

- LAN. 2015. "AKUNTABILITAS" Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta.
- Lucy, dkk. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness Vol. 3(1)*, 21-42.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi pertama. Andi. Yogyakarta
- _____. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Masyhur, Mirza. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai. *JOM Fekon, Vol. 4(1)*, 2, 2017.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Metro Tempo.co. Tersedia di <https://metro.tempo.co/> [diakses pada 3 Januari 2023].
- Pojok Bogor. Tersedia di <https://bogor.pojoksatu.id> [diakses pada 10 Juni 2022]
- Quartina, N. 2018. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2002 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Shende Suresh dan Tony Bennet. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- Deviyani, Shinta. 2021. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kota Bogor. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sulistoni, G.,2003. *Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*. Nusa Tenggara Barat : SOMASI.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perekayasaan Peloporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta.
- Wibowo, Sujatmiko. 2019. Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Pemberian Opini atas Laporan Keuangan Audited (Studi Kasus pada Kementerian di Indonesia). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Vol. 5(1), 6, 2019 Hal. 41-52*.
- Yusriwati. 2021. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang (JAAIP) Volume 1(2), 10, 2021*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indrie Avisha
Alamat : Padurenan RT 009/RW 011 Kelurahan
Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat 16916
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 17 Maret 2000
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SDN Ciriung 02
• SMP : SMPN 4 Cibinong
• SMA : SMK Triple “J”
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2023

Peneliti

(Indrie Avisha)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Lampiran : Kuesioner Penelitian

Kepada Yth, Bapak/Ibu Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
di Kabupaten Bogor

Dengan hormat,

Dalam rangka menyusun tugas akhir (Skripsi) sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan maka dengan ini saya :

Nama : Indrie Avisha
NPM : 022118082
Jurusan/Fakultas : Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini bermaksud melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Kabupaten Bogor).”**

Untuk ini saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dan menjawab seluruh item pertanyaan dalam kuesioner ini secara objektif sesuai dengan petunjuk pengisian. Kuesioner ini nantinya semata-mata untuk keperluan ilmiah dan saya berjanji untuk menjaga kerahasiaan kuesioner ini. Atas kerjasama, bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Ketua komisi pembimbing



Budiman Slamet, M.Si., Ak., CA., CFR.A

Hormat saya



Indrie Avisha

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari agar sudi kiranya memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian skripsi saya. Dan saya menjamin serta bertanggung jawab atas informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan adalah untuk kepentingan akademis semata. Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan, saya ucapkan terima kasih.

A. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki

Jabatan : Kepala Badan
 Sekretariat
 Bendahara
 Bidang Anggaran
 Bidang Perbendaharaan
 Bidang Aset
 Bidang Akuntansi
 Lain-lain,

Pendidikan Terakhir : SLTA S2
 S1 Lainnya,

Masa Kerja : >1-5 Tahun >10 Tahun
 >6-10 Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pegawai yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

1. Pegawai yang bekerja pada bagian bidang anggaran, bidang perbendaharaan bidang aset, bidang akuntansi dan yang berkaitan dengan masalah keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pegawai dengan masa jabatan minimal 1 tahun atau lebih.

Mohon Bapak/Ibu/Saudara/Saudari memberikan tanda cek list (\surd) pada salah satu pilihan jawaban mengenai pernyataan dan pertanyaan yang diberikan sesuai dengan kondisi tempat Bapak/Ibu/Saudara/Saudari bekerja. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 sampai dengan 5, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pernyataan/pertanyaan. Skor jawaban adalah sebagai berikut:

Keterangan	(SS) Sangat Setuju	(S) Setuju	(N) Netral	(TS) Tidak Setuju	(STS) Sangat Tidak Setuju
Skor	5	4	3	2	1

1. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH KAB. BOGOR

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	BPKAD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan)					
2.	BPKAD mampu menyelesaikan laporan keuangan (laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan) tepat waktu.					
3.	Laporan keuangan BPKAD menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu. (<i>feedback value</i>)					
4.	Laporan keuangan BPKAD menyediakan informasi yang memprediksi masa yang akan datang berdasarkan masa lalu dan kejadian masa kini. (<i>predictive value</i>)					
5.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan BPKAD telah menggambarkan dengan jujur peristiwa dan transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					
6.	Informasi dalam laporan keuangan BPKAD bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
7.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan BPKAD dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.					
8.	Laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya					

9.	Dalam penyusunan laporan keuangan BPKAD telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.					
10.	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan BPKAD memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan pemerintah.					

2. AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
11.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media masa.					
12.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.					
13.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (<i>website</i>)					
14.	Laporan keuangan memuat informasi yang sudah seharusnya terpublikasi.					
15.	Laporan keuangan dapat diakses dimanapun dan kapanpun.					
16.	Seluruh pengguna memiliki kemudahan yang sama dalam mengakses laporan keuangan.					

3. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
17.	APBD disusun dengan pendekatan Kinerja					
18.	Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan					
19.	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat Dipertanggungjawabkan					

20.	Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah					
21.	Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah					
22.	Laporan keuangan BPKAD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK					
23.	Laporan keuangan BPKAD disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan					
24.	Dilakukannya finansial audit terhadap laporan keuangan daerah					
25.	Indikator hasil kerja yang akan dicapai, di tetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan APBD					

Lampiran 2 : Tabulasi Data

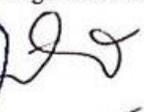
No. Responden	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH										Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
1	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	46
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	30
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	43
6	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	37
7	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	30
8	4	4	3	3	3	2	4	4	3	3	33
9	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	34
10	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	41
11	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	45
12	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	20
13	3	3	2	4	4	3	3	3	2	4	31
14	2	4	4	2	5	3	2	4	4	2	32
15	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	35
16	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	38
19	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	44
20	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	23
21	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	47
22	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	48
23	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	43
24	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	18
25	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	36
26	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	37
27	4	2	4	4	2	4	4	4	1	4	33
28	1	3	3	3	3	1	1	3	3	3	24
29	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	28
30	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	27
31	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	46
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
33	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	30
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
35	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	43
36	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	37
37	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	30
38	4	4	3	3	3	2	4	4	3	3	33
39	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	34
40	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	41

41	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	45
42	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	20
43	3	3	2	4	4	3	3	3	2	4	31
44	2	4	4	2	5	3	2	4	4	2	32
45	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	35
46	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
48	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	38
49	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	44
50	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	23
51	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	47
52	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	48
53	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	43
54	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	18
55	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	36
56	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	37
57	4	2	4	4	2	4	4	4	1	4	33
58	1	3	3	3	3	1	1	3	3	3	24
59	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	28
60	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	27
61	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	45
62	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	20
63	3	3	2	4	4	3	3	3	2	4	31
64	2	4	4	2	5	3	2	4	4	2	32
65	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	35
66	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
68	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	38
69	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	44
70	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	23

No Responden	AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH						Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	5	5	5	4	5	5	29
2	5	4	4	5	5	4	27
3	2	2	3	2	2	2	13
4	5	5	5	5	5	5	30
5	3	3	4	3	3	3	19
6	1	2	3	2	1	2	11
7	3	3	2	4	2	2	16
8	4	3	5	2	5	3	22
9	4	3	3	3	4	3	20
10	4	4	2	4	4	4	22
11	2	3	4	4	3	4	20
12	2	3	3	4	2	3	17
13	4	4	3	4	4	4	23
14	3	3	4	4	3	3	20
15	3	3	4	3	3	3	19
16	3	3	3	3	4	3	19
17	3	4	4	4	3	4	22
18	3	3	4	4	4	4	22
19	4	4	4	3	4	4	23
20	2	2	3	2	2	2	13
21	4	5	4	4	4	5	26
22	3	3	3	5	5	5	24
23	4	4	3	4	4	4	23
24	2	2	3	2	1	2	12
25	3	2	2	3	3	3	16
26	3	3	4	4	4	4	22
27	1	3	3	3	3	4	17
28	3	3	1	2	3	3	15
29	3	2	4	4	4	2	19
30	3	3	1	2	3	3	15
31	5	5	5	4	5	5	29
32	5	4	4	5	5	4	27
33	2	2	3	2	2	2	13
34	5	5	5	5	5	5	30
35	3	3	4	3	3	3	19
36	1	2	3	2	1	2	11
37	3	3	2	4	2	2	16
38	4	3	5	2	5	3	22
39	4	3	3	3	4	3	20
40	4	4	2	4	4	4	22
41	2	3	4	4	3	4	20

42	2	3	3	4	2	3	17
43	4	4	3	4	4	4	23
44	3	3	4	4	3	3	20
45	3	3	4	3	3	3	19
46	3	3	3	3	4	3	19
47	3	4	4	4	3	4	22
48	3	3	4	4	4	4	22
49	4	4	4	3	4	4	23
50	2	2	3	2	2	2	13
51	4	5	4	4	4	5	26
52	3	3	3	5	5	5	24
53	4	4	3	4	4	4	23
54	2	2	3	2	1	2	12
55	3	2	2	3	3	3	16
56	3	3	4	4	4	4	22
57	1	3	3	3	3	4	17
58	3	3	1	2	3	3	15
59	3	2	4	4	4	2	19
60	3	3	1	2	3	3	15
61	2	3	4	4	3	4	20
62	2	3	3	4	2	3	17
63	4	4	3	4	4	4	23
64	3	3	4	4	3	3	20
65	3	3	4	3	3	3	19
66	3	3	3	3	4	3	19
67	3	4	4	4	3	4	22
68	3	3	4	4	4	4	22
69	4	4	4	3	4	4	23
70	2	2	3	2	2	2	13

Lampiran 3 : Surat Permohonan Riset ke Kesbangpol Kabupaten Bogor

	<h2>Universitas Pakuan</h2> <h3>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</h3> <p>S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi A"</p> <p>Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)</p>
<p>Nomor : 425 /WD.1/FEB-UP/XI/2022</p> <p>Lampiran :</p> <p>Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data</p> <p>Kepada : Yth. Pimpinan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.41 , Tengah , Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat 16914.</p>	<p>2 Nov 2022</p>
<p>Dengan hormat,</p> <p>Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.</p> <p>Maka bersama ini kami hadapkan:</p> <p>Nama : Indrie Avisha NPM : 022118082 Program Studi : Akuntansi</p> <p>Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.</p>	
<p>a.n. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan</p>   <p>Dr. Retno Murtanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.</p>	
<p>Tembusan : Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).</p>	
<p>Website : https://feb.unpak.ac.id/ e-mail : febkonomi@unpak.ac.id</p>	

Lampiran 4 : Surat Permohonan Riset ke BPKAD Kabupaten Bogor



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 425 /WD.1/FEB-UP/XI/2022 2 Nov 2022
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

Kepada : Yth. Pimpinan
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 (BPKAD)
 Jl. Aman No. 1 Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa
 Barat 16914

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Indrie Avisha
 NPM : 022118082
 Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
 Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id

Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol ke BPKAD Kabupaten Bogor

	PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914 Telp/Fax. (021) 8758836 Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Tlp/Fax. (021) 8758836	
Nomor : 070 / 721 - Bakesbangpol Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Rekomendasi Penelitian	Yth.	Cibinong, 28 November 2022 Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor di Cibinong
Dasar : <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor. 		
Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Nomor : 425/WD.1/FEB-UP/XI/2022, Tanggal 2 November 2022. Perihal Permohonan Riset / Magang / Data.		
Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :		
Nama : INDRIE AVISHA Alamat : Padurenan Rt. 009 Rw. 011 Desa Pabuaran Kecamatan Cibinong Judul Penelitian : Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Penanggung Jawab : Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang Waktu : 1 Desember 2022 s.d 1 Maret 2023 Tempat : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor		
Dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku; Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban di lokasi Penelitian; Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari tempat lokasi penelitian setempat; Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas; Mengadakan koordinasi dengan stakeholder terkait; Mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19; Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor. 		
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.		
		
		A.N KEPALA BADAN KABID KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK,  ASEP NURDIN, S.SOS., MA PEMBINA NIE 19671101991021006
Tembusan : <ol style="list-style-type: none"> Yth. Ptl. Bupati Bogor (Sebagai Laporan); Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. 		

Lampiran 6 : Uji Kualitas Data dengan Uji Validitas, Uji Realibilitas

- Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah.

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)
X1.1	Pearson Correlation	1	.614*	.567*	.810*	.481*	.726*	1.000**	.711*	.491*	.852**	.881**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
X1.2	Pearson Correlation	.614*	1	.530*	.605*	.876*	.469*	.614*	.928*	.593*	.590**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
X1.3	Pearson Correlation	.567*	.530*	1	.484*	.453*	.770*	.567*	.562*	.840*	.486**	.753**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
X1.4	Pearson Correlation	.810*	.605*	.484*	1	.536*	.575*	.810*	.677*	.422*	.924**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
X1.5	Pearson Correlation	.481*	.876*	.453*	.536*	1	.486*	.481*	.822*	.551*	.578**	.777**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
X1.6	Pearson Correlation	.726*	.469*	.770*	.575*	.486*	1	.726*	.529*	.670*	.595**	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
X1.7	Pearson Correlation	1.000**	.614*	.567*	.810*	.481*	.726*	1	.711*	.491*	.852**	.881**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
X1.8	Pearson Correlation	.711*	.928*	.562*	.677*	.822*	.529*	.711*	1	.490*	.695**	.878**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
X1.9	Pearson Correlation	.491*	.593*	.840*	.422*	.551*	.670*	.491*	.490*	1	.424**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
X1.10	Pearson Correlation	.852*	.590*	.486*	.924*	.578*	.595*	.852*	.695*	.424*	1	.848**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	Pearson Correlation	.881*	.843*	.753*	.828*	.777*	.791*	.881*	.878*	.722*	.848**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Y.4	Pearson Correlation	.972**	.647*	.780*	1	.739*	.766*	.721*	.663*	.705*	.901**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Y.5	Pearson Correlation	.718**	.951*	.735*	.739*	1	.774*	.637*	.715*	.641*	.883**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Y.6	Pearson Correlation	.779**	.768*	.950*	.766*	.774*	1	.670*	.715*	.740*	.917**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Y.7	Pearson Correlation	.805**	.673*	.744*	.721*	.637*	.670*	1	.541*	.541*	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Y.8	Pearson Correlation	.624**	.646*	.692*	.663*	.715*	.715*	.541*	1	.652*	.801**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Y.9	Pearson Correlation	.668**	.577*	.719*	.705*	.641*	.740*	.541*	.652*	1	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Pearson Correlation	.908**	.849*	.912*	.901*	.883*	.917*	.816*	.801*	.803*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

- Uji Realibilitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.945	10

- Uji Realibilitas Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.883	6

- Uji Realibilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.957	9

Lampiran 7 : Uji Asumsi Klasik dengan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas

- Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.09891135
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.074
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

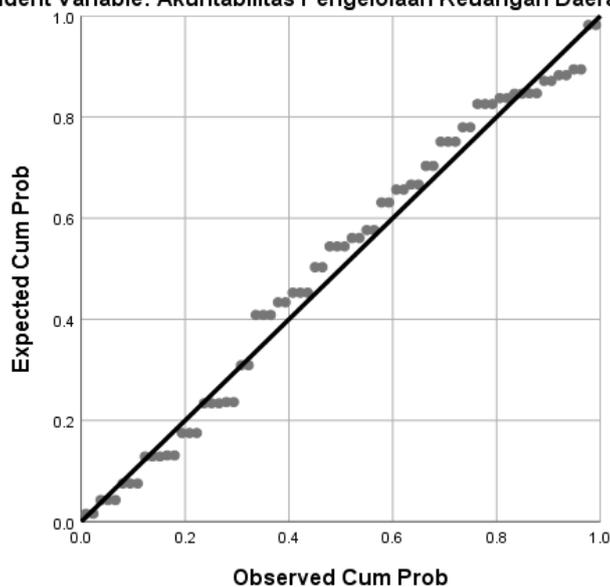
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)



- Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.969	2.381		1.247	.217		
	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	.599	.089	.671	6.740	.000	.465	2.149
	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	.329	.161	.204	2.045	.045	.465	2.149

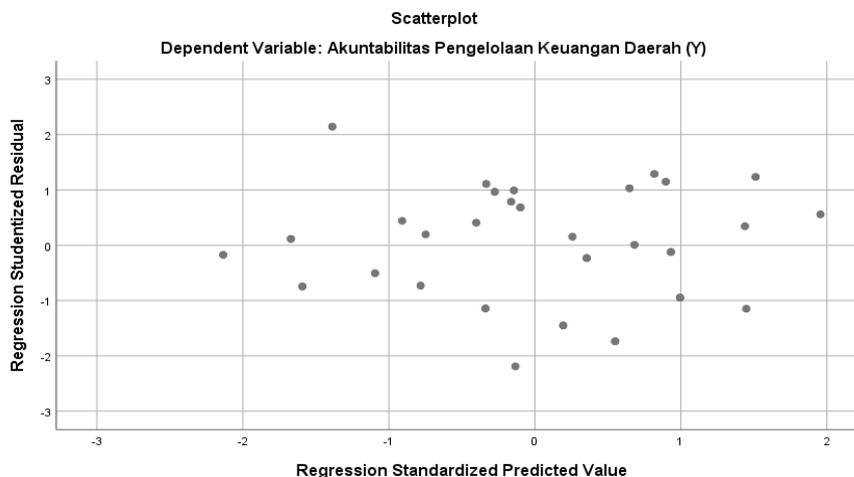
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.708	1.314		1.299	.198
	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	-.041	.049	-.145	-.831	.409
	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	.156	.089	.306	1.755	.084

a. Dependent Variable: Abs_Res



Lampiran 8 : Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.969	2.381		1.247	.217		
	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	.599	.089	.671	6.740	.000	.465	2.149
	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	.329	.161	.204	2.045	.045	.465	2.149

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran 9 : Pengujian Hipotesis dengan Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Signifikan Simultan (Uji F) dan Uji Parsial (Uji t)

- Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.831 ^a	.691	.682	4.160

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2), Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

- Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.969	2.381		1.247	.217		
	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	.599	.089	.671	6.740	.000	.465	2.149
	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	.329	.161	.204	2.045	.045	.465	2.149

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2594.512	2	1297.256	74.975	.000 ^b
	Residual	1159.274	67	17.303		
	Total	3753.786	69			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2), Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)